

Tabel IV.2
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Utara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA	OPD
1	2	3	4	5	5	6
1	Mewujudnya Tertib Administrasi Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah	Persentase penyelesaian batas daerah	Sesuai Permendagri 141 tahun 2017 tentang penegasan batas daerah disebutkan bahwa Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap batas daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota diwilayahnya)	$\frac{\text{Jumlah Segmen Batas yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Segmen Batas seluruh Kab/Kota}} \times 100\%$		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Terwujudnya Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Peraturan Presiden No 13 tahun 2019 Tentang LPPD)	Hasil Penilaian Kinerja Pemerintahan Daerah		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Persentase Kerjasama yang difasilitasi		$\frac{\text{Jumlah kerjasama yang diterbitkan}}{\text{Jumlah kerjasama yang diusulkan}} \times 100\%$		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2	Meningkatnya peran pembinaan dari berbagai kalangan yang berkompeten terhadap kehidupan bermasyarakat dan beragama	Persentase pemberian bantuan hibah keagamaan	Peningkatan Penerima Hibah pada Kabupaten/ Kota	$\frac{\text{Jumlah Pemberian Rekomendasi proposal keagamaan}}{\text{Jumlah Proposal keagamaan yang masuk}} \times 100\%$		Biro Kesejahteraan Rakyat
		Persentase pemberian bantuan hibah pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	Peningkatan Penerima Hibah pada Kabupaten/ Kota	$\frac{\text{Jumlah Pemberian Rekomendasi proposal pelayanan dasar}}{\text{Jumlah proposal pelayanan dasar yang masuk}} \times 100\%$		Biro Kesejahteraan Rakyat
3	Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah.	Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tepat Waktu.	Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi.	$\frac{\text{Jumlah Rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah difasilitasi oleh Kemendagri}}{\text{Jumlah Rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi}} \times 100\%$	Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kab/Kota	Biro Hukum
		Persentase Produk Hukum Daerah yang diinformasikan.	Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	$\frac{\text{Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang telah dievaluasi dan difasilitasi}}{\text{Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang telah dimohon untuk evaluasi dan fasilitasi}} \times 100\%$	Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kab/Kota	Biro Hukum
			Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi	$\frac{\text{Jumlah Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang telah dieksaminasi}}{\text{Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang diusulkan}} \times 100\%$	Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kab/Kota	Biro Hukum
	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprov dan Masyarakat.	Persentase Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan.	Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprovu.	$\frac{\text{Jumlah Pergub dan Perda yang diinformasikan}}{\text{Jumlah Pergub dan Perda yang telah ditetapkan}} \times 100\%$	Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kab/Kota	Biro Hukum
		Persentase Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan dan Perlindungan HAM.	Penanganan Perkara Pemprov di Pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah Pengaduan yang masuk}} \times 100\%$	Bagian Bantuan Hukum	Biro Hukum
			Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah Pengaduan yang masuk}} \times 100\%$	Bagian Bantuan Hukum	Biro Hukum

4	Mewujudkan dukungan kebijakan lingkup Perekonomian Daerah	Persentase Perumusan kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan	Kebijakan Lingkup Perekonomian yang di implementasikan untuk peningkatan perekonomian daerah yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah bahan kebijakan yang diimplementasikan}}{\text{Jumlah bahan kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$	Bagian Kebijakan Perekonomian dan Bagian Sumber Daya Alam	Biro Perekonomian
		Persentase BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	BUMD yang memiliki kinerja keuangan yang sehat	$\frac{\text{Jumlah BUMD kinerja keuangan yang sehat}}{\text{Jumlah BUMD yang dibina}} \times 100\%$	Bagian BUMD dan BLUD	Biro Perekonomian
		Persentase BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	BLUD yang memiliki kinerja pelayanan yang tinggi	$\frac{\text{Jumlah BLUD kinerja pelayanan tinggi}}{\text{Jumlah BLUD yang dibina}} \times 100\%$	Bagian BUMD dan BLUD	Biro Perekonomian
5	Mewujudkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang transparan, akuntabel dan memenuhi standarisasi LPSE LKPP	Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Pencapaian target realisasi pembangunan melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah Provsu yang berasaskan transparan dan akuntabel	$\frac{\text{Jumlah paket tender yang diproses}}{\text{Jumlah paket tender yang diumumkan (SiRUP)}} \times 100\%$	49 OPD, BUMD	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Persentase Pelayanan Standarisasi LPSE	Pemenuhan 17 standarisasi LPSE Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi 17 Standarisasi LPSE	33 Kabupaten/Kota	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
6	Menciptakan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan untuk pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	Kebijakan yang disusun dalam peraturan gubernur Sumatera Utara	Jumlah Kebijakan yang diterbitkan	Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Wilayah	Biro Administrasi Pembangunan
		Persentase Realiasi Fisik dan Non Fisik pada Perangkat Daerah	Data Realiasi Fisik dan Non Fisik pada Perangkat Daerah yang di Input pada Aplikasi	$\frac{\text{Jumlah Anggaran Fisik dan Non Fisik Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Realisasi Anggaran Fisik dan Non Fisik Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Bagian Pelaporan Pembangunan Daerah	Biro Administrasi Pembangunan
7	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Indeks Pelayanan Publik	Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh KEMENPANRB	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Kementerian PANRB	MENPANRB	Biro Organisasi
		Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah.	$\frac{\text{Jumlah usulan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah usulan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah}} \times 100$	Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Biro Organisasi
		Nilai capaian pelaporan kinerja	Laporan hasil evaluasi Kementerian PANRB	Hasil Evaluasi Capaian Pelaporan Kinerja dari Kementerian PANRB	MENPANRB	Biro Organisasi
8	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Pimpinan Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan	Pelaksanaan Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan daerah adalah Pemenuhan Kebutuhan dalam Rangka Mendukung Kegiatan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah	$\frac{\text{Jlh Fasilitasi yang dilayani}}{\text{Jlh Permintaan Fasilitasi Kerumahtanggaan Pimpinan}} \times 100\%$	Biro Umum	Biro Umum
	Meningkatnya Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprov	Persentase Kontribusi PAD dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprov	PAD Dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dan Mess Pemprov Adalah Retribusi yang Diperoleh dari Pemanfaatan Pelayanan Gedung dari Mess Pemprov yang dikelola Biro Umum	$\frac{\text{Jlh Realisasi PAD dari Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprov}}{\text{Target PAD dari Pemanfaatan Gedung dan Mess Pemprov}} \times 100\%$	Biro Umum	Biro Umum
9	Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Materi Pimpinan	Fasilitasi Bahan Materi Pimpinan	$\frac{\text{Jumlah Bahan Materi Pimpinan disiapkan}}{\text{Jumlah Kegiatan Pimpinan}} \times 100\%$	OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Biro Administrasi Pimpinan

	Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan tamu utama Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pelayanan dan Fasilitas Kegiatan Pimpinan berdasarkan UU no. 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pimpinan yang difasilitasi}}{\text{Jumlah Kegiatan Pimpinan}} \times 100\%$	Biro Administrasi Pimpinan	Biro Administrasi Pimpinan
--	--	--	--	----------------------------	----------------------------